Brimob Bentuk 3 Wilayah Komando, Salah Satunya di Ibu Kota Nusantara

Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memiliki struktur organisasi baru dengan tiga pembagian wilayah menjelang Pemilu 2024. Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komjen Anang Revandoko menjelaskan dalam struktur organisasi baru itu, masing-masing tiga wilayah dipimpin Komandan Pasukan Brimob. Pasukan Brimob I bertanggung jawab untuk wilayah Indonesia Barat dan akan dipusatkan di Aceh. Sementara untuk Pasukan Brimob II bertanggungjawab pada wilayah Indonesia Tengah dan berada di Kalimantan Timur. "Pasukan Brimob II di wilayah Indonesia Tengah untuk menjaga kebijakan pemerintah yaitu untuk persiapan IKN bagaimana Pasukan Brimob II menjaga kebijakan kita untuk persiapan IKN yang ada di Kalimantan Timur," ujarnya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (10/3). Sementara untuk Pasukan Brimob III akan menaungi wilayah Timur dan akan bertempat di Papua khususnya di Timika. Ketiga Komandan Pasukan Brimob di tiga wilayah tersebut nantinya akan dipimpin jenderal bintang satu. Dalam struktur organisasi yang baru, jabatan Dankor Brimob akan diisi oleh Perwira Tinggi dengan pangkat Komjen. Sementara untuk jabatan Wadankor Brimob ditempati oleh Irjen atau bintang dua. Selanjutnya jabatan Kepala Biro Perencanaan Operasi akan diisi oleh anggota berpangkat Brigjen. Dia mengatakan peresmian struktur baru serta pelantikan itu dilakukan untuk mempercepat dalam memberikan perlindungan. melayani dan mengayomi masyarakat. "Korps Brimob Polri memiliki tugas penanganan konflik, kelompok bersenjata yang lintas Provinsi dan lintas negara. Maka Polri perlu percepatan penanganan konflik di awal agar permasalahan tidak semakin melebar ke wilayah lainnya," jelasnya. Selain itu Anang mengatakan nantinya Indonesia juga akan segera memasuki tahun politik, sehingga diperlukan antisipasi dan respons cepat untuk menangani setiap permasalahan yang ada. "Polri pada tahun politik saat ini mengantisipasi lebih dengan kecepatan dalam merespons, serta melihat situasi jika ada potensi-potensi yang membahayakan dan bersifat mengancam kepada masyarakat dan institusi," ucap Anang.